

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Sebagai pertanggungjawaban kepada publik bahwa hasil dari Laporan Keuangan Daerah yang akan disusun juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dimana didalam peraturan pemerintah mengenai standar akuntansi keuangan menjelaskan tentang ketentuan umum dan penerapan standar akuntansi keuangan. Adapun empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dimuat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam peningkatan akuntabilitas serta kepercayaan terhadap informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sendiri memiliki hak untuk memberikan opini audit atas laporan keuangan yang telah disajikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa ada empat tingkatan opini audit, yang diurutkan dari yang tertinggi yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Pemberian opini WTP memiliki beberapa kriteria yaitu, sistem pengendalian internal yang memadai, tidak adanya salah saji yang material atas laporan keuangan, dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP.

LKPD bertujuan untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan berupa laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan hasil kinerja keuangan yang berguna bagi pemerintah daerah guna untuk mengevaluasi dan menyusun kebijakan yang ditujukan untuk mengelola sumber dana. Sehingga diharapkan untuk hasil dari LKPD harus berkualitas, kualitas dari laporan keuangan

adalah tingkat baik atau tidaknya dari suatu laporan atas pengelolaan keuangan pada suatu organisasi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Akuntansi, karena banyaknya data yang dikelola dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sistem informasi akuntansi yang baik yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. SIA adalah suatu sistem yang menjalankan serangkaian proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data akuntansi serta data lainnya untuk menghasilkan informasi yang bisa berguna untuk pengambilan keputusan (Romney and Steinbart 2004).

Penerapan sistem informasi akuntansi juga harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung dalam mengelola banyaknya data agar bisa menghasilkan LKPD yang berkualitas. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dimana pemanfaatan teknologi informasi ini bisa mempercepat proses penyusunan LKPD dan memiliki tingkat akurat yang lebih tinggi dari proses manual yang dilakukan oleh individu, karena banyaknya data yang harus diolah dan disusun sedemikian rupa maka pemanfaatan teknologi informasi ini sendiri sangatlah membantu proses penyusunan LKPD.

Kompetensi dari sumber daya manusia juga menjadi bahan pertimbangan dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Aspek yang terpenting dalam pengendalian internal adalah anggota atau individu. Jika individu dalam suatu organisasi merupakan pribadi yang berkompeten dan bisa dipercaya serta memiliki soft skill dan hard skill yang sesuai dengan organisasi maka LKPD yang dihasilkanpun akan berkualitas.

Membangun kompetensi sumber daya manusia juga diperlukan penerapan sistem pengendalian internal didalam pemerintahan daerah, sehingga akan menciptakan keselarasan dalam menciptakan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Winarno (2006) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah semua ukuran, rencana organisasi, dan metode terkoordinasi yang diterapkan oleh suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk menjaga keakurasian,

melindungi aktiva, keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi terhadap kebijakan dari manajemen. Dimana jika dijalankan dengan baik, sistem pengendalian internal akan mempengaruhi proses penyusunan LKPD sehingga LKPD yang dihasilkan bisa berkualitas.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memang telah banyak dilakukan dan dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Menurut penelitian yang terdahulu oleh Annisa (2019) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening” memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern” memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa, yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi dan memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putriasri (2017) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY” memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurwakhida (2016) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada BPRS Bangun Drajat Warga)”, memperoleh hasil bahwa sistem informasi akuntansi dan motivasi

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di BPRS Bangun Drajat Warga. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan dengan baik, dan motivasi kerja karyawan yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan. Begitupula penelitian yang terakhir oleh Yulis (2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” juga memberikan hasil bahwa penerapan sistem informasi, pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang terdahulu memotivasi penulis untuk melakukan pengujian kembali dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima penghargaan atas prestasi Peringkat pertama laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat UAPPA-W tahun 2019 kategori lebih dr 6 satker. Walaupun Pemerintah Daerah DIY mendapatkan opini WTP sejak tahun 2010, masih banyak kekurangan yang dibuktikan dengan masih adanya catatan dari BPK, salah satu contohnya adalah belum tepatnya pencatatan asset-aset milik DIY yang berdiri diatas *Sultan Ground*. Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut, tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut adalah Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap SMA/SMK, yang merupakan unit kerja baru di lingkungan Pemda DIY sehubungan dengan pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah, belum memadai
2. Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM belum memproses jaminan pertambangan milik perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi senilai 326.106,00
- Pelaksanaan Operasional Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* Tidak Sesuai Ketentuan ; dan
- Pelaksanaan beberapa pekerjaan tidak sesuai ketentuan.

BPK meminta Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga peneliti mengambil judul

“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah tersebut, penulis berhasil merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah sistem informasi akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian kembali untuk mencari tahu pengaruh variabel sistem informasi akuntansi pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori :

Penulis berharap hasil dari penelitian ini, dapat memberikan bukti secara empiris terhadap penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bagi para mahasiswa dan akademis.

2. Manfaat Praktik :

Penulis berharap dari hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi dan wawasan baru bagi pemerintah daerah selain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5. Batasan Masalah

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK selama 11 tahun berturut semenjak tahun 2010. Pada tahun 2018, menurut Bahrullah selaku Wakil Ketua BPK Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mendapatkan beberapa rekomendasi dan catatan kecil. Hal ini tentunya dipengaruhi berbagai faktor yang sangat menarik untuk diteliti lebih jauh. Fenomena ini menggambarkan masih diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan yang ada pada pemerintah daerah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yaitu dengan mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Penelitian ini memang difokuskan hanya pada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objeknya, sehingga peneliti memilih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koresponden seluruh pegawai BPKAD DIY yang terlibat dalam bidang keuangan . Alasan adanya pembatasan masalah ini karena hubungan antara Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.